

PERAN SOSIAL POLITIK KIAI DI INDONESIA

Miftah Faridl**

Abstrak

Kiai merupakan suatu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Islam. Kiai menjadi salah satu elit strategis dan merupakan figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Pada titik inilah dapat dilihat peran-peran strategis kiai khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan studi, ditemukan bahwa pertama, kiai terbukti melakukan sejumlah penafisiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya, walaupun tetap menggunakan corak pemikiran abad pertengahan. Kedua, pada umumnya kiai memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan, urusan sosial politik cenderung diterlantarkan, sehingga ketika arus reformasi muncul, banyak kiai yang tampak gagap menanggapi.

Berkaitan dengan peran sosial politik kiai, diindikasikan ada hubungan antara persepsi teologis dengan perilaku sosial politik kiai. Secara spesifik, perbedaan perilaku sosial politik kiai terlihat pula pada kelenturan sikap politik yang diperankannya. Kiai dengan latar sosioreligius kelompok modernis memiliki sikap cenderung tertutup, sedangkan kiai dengan latar belakang sosioreligius kelompok tradisional memiliki sikap yang cenderung lentur dan terbuka. Dengan fenomena ini maka dapat dikemukakan dua model kiai, Pertama, model yang memilih diam, ketika menghadapi berbagai perubahan sosial politik mereka biasanya lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah). Kedua, model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik, cenderung agresif dan ikut terlibat membidani kelahiran partai-partai.

Kata Kunci : Kiai dan peran sosial politik.

1 Pendahuluan

Meskipun sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, istilah “kiai” untuk pertama kalinya diperkenalkan Geertz pada tahun 1960

** Dr. KH. Miftah Faridl, adalah Ketua Badan Pengurus YPI UNISBA

dalam konteks studi antropologi untuk menunjukkan sosok ulama dan kiai. Sementara Horikoshi secara konsisten membedakan penggunaan istilah “kiai” dari “ulama” karena fungsi formal yang diperankannya. Ulama lebih memerankan fungsi-fungsi administratif, sedangkan kiai cenderung bermain pada tataran kultural. Dengan menggunakan argumentasi ini, kita dapat memahami mengapa perkumpulan formal komunitas pemilik ilmu agama Islam di Indonesia menggunakan istilah “ulama” alih-alih “kiai”, yaitu Majelis Ulama Indonesia, dan bukan Majelis Kiai Indonesia.

Karena itu, dalam tulisan ini, saya sengaja menggunakan istilah “kiai”, bukan “ulama”, karena analisisnya yang lebih ditekankan pada aspek kultural dari kehidupan figur sosial yang disebut kiai. Lebih-lebih untuk melihat fungsi sosial politik yang diperankannya seperti terlihat dalam judul makalah ini.

Fenomena perbedaan perilaku sosial politik di kalangan kiai, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor yang saling mempengaruhi. *Pertama*, faktor posisi sosial kiai yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Studi yang dilakukan Horikoshi (1987), misalnya menunjukkan kekuatan kiai sebagai sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Sementara Geertz (1960) menunjukkan kiai sebagai makelar budaya (*cultural brokers*) dan menyatakan bahwa pengaruh kiai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini. Meskipun secara politis kiai dikategorikan sebagai sosok yang tidak punya pengalaman dan kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin dia gunakan.

Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah masyarakatnya, kiai dipandang memiliki kemampuan “luar biasa” untuk menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap “fatwa” politik yang terakhir untuk diikuti. Kasus Gus Dur yang tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden RI ketika itu, seperti diketahui banyak kalangan, sebetulnya karena “nasihat-nasihat” kiai yang mendorong untuk mengambil keputusan seperti itu.

Hubungan kausalitas antara kedua faktor inilah yang kemudian dielaborasi secara kritis dalam tulisan ini. Secara substantif, tulisan ini

banyak diilhami oleh hasil studi saya tahun 1999-2000 tentang peran persepsi teologis dalam perilaku sosial politik kiai.

Kiai dan Persepsi Teologis Masyarakatnya

Penelusuran pemikiran teologis kiai dalam hal ini dilakukan dengan merujuk pada konsep iman. Iman yang berakar pada corak teologis tertentu pada dasarnya bersifat individual. Namun demikian, para pemeluk agama juga sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri, sebagai pribadi-pribadi yang terpisah dari individu lainnya. Mereka membentuk komunitas tertentu yang apabila telah mapan atau melembaga dalam suatu masyarakat akan terbentuk apa yang disebut pranata baru. Pada saat terjadinya pranata baru inilah dalam masyarakat kemudian muncul elit sosial tertentu yang menjadikan iman sebagai *habitus* (ciri yang menjadi identitas suatu kelompok).

Di dalam masyarakat Islam, kiai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsat al-anbiya*). Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya, bukan saja pada aspek hukum-hukum keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kiai, khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia.

Karena itu, perbincangan di seputar peran sosial politik kiai dalam medan sosial politik yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat Indonesia, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik. Selain itu, kenyataan empirik juga mengilustrasikan perpaduan antara agama dan politik ini secara terlihat pada peran-peran yang dimainkan sejumlah kiai dalam panggung politik praktis paling tidak selama beberapa dekade terakhir. Di antara efek sosial dari peran ganda yang ditimbulkannya adalah adanya pergeseran kecenderungan masyarakat dalam menetapkan figur kepemimpinan informal, khususnya kiai.

Bersamaan dengan itu, masyarakat masih kuat beranggapan bahwa secara normatif, kiai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Ia masih ditempatkan sebagai sumber “fatwa” terakhir ketika masyarakat berada di simpang jalan di antara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain,

fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi kiai berkenaan dengan peran-peran sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya. Karena itu, untuk memahami tarik menarik antara peran ganda kiai dalam rentang kehidupan sosial-politik dan agama, pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari usaha penelusuran akar teologis yang menjadi kerangka dasar perilaku sosial politik yang diperankannya.

Berkaitan dengan aspek teologis ini, di antara hal menarik dari studi yang pernah saya lakukan adalah adanya perbedaan yang signifikan dalam menentukan pilihan-pilihan politik berdasarkan kecenderungan teologis yang dianutnya. Ada di antaranya kiai yang lebih lentur dan sangat mudah berubah, sehingga politik terkesan menjadi “semacam” sebuah permainan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis yang senantiasa berubah dan berkembang. Sementara sebagian lainnya, ada kiai yang terkesan kaku, atau mungkin juga bisa disebut konsisten dengan pendirian awalnya, sehingga tampak menempatkan politik dalam kerangka persoalan prinsip. Perbedaan-perbedaan inilah tampaknya yang kemudian telah ikut membidani lahirnya partai-partai politik yang bernuansa agama dan sekaligus dipelopori oleh figur-figur yang lebih dikenal sebagai kiai ketimbang politisi.

Posisi Teologis dan Peran Sosial-Politik Kiai

Studi tentang kiai, dengan menggunakan perspektif yang bervariasi, hingga saat ini memang telah banyak dilakukan oleh para pakar dengan latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Akan tetapi, studi sosiologis tentang kiai dengan memasukkan variabel latar belakang teologis yang dianutnya, sejauh yang dapat ditemukan, masih belum banyak dilakukan. Padahal latar belakang teologis dalam penelusuran peran sosial politik kiai merupakan variabel penting untuk mengungkap kemungkinan-kemungkinan adanya perubahan kerangka persepsi yang menjadi dasar pembentukan struktur kognisi yang dimilikinya.

Analisis pada tulisan ini selanjutnya dilakukan dengan mendasarkan pada konsep ruang (*space*) dan medan (*field*) terutama untuk mencermati seberapa jauh kiai memerankan ajaran agama yang diyakininya dalam perilaku sosial politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang berkembang paling tidak sejak dekade 1980-an, kiai sendiri ditempatkan dalam ruang sosial yang sedang berkembang di Indonesia. Dalam kerangka seperti itu persepsi teologis kiai diletakkan dalam dua ruang yang saling mempengaruhi: ruang ekstern masyarakat Indonesia dan ruang intern diri masing-masing individu. Sedangkan fenomena politik

nasional yang melingkupi kehidupan sosial kiai digunakan untuk menggambarkan medan sosial yang sedang berlangsung.

Di samping medan politik seperti disebutkan di atas, masih ada fungsi lain yang ikut mempengaruhi kehidupan sosial politik suatu masyarakat, yaitu ajaran Islam dan simbolisasinya. Artinya, ruang kehidupan politik itu pada praktiknya terus menerus mendapat perimbangan dari nilai ideal dan moral ajaran Islam yang telah dihayati masyarakat dalam waktu lama. Hal ini merujuk pada temuan Mohammed Arkoun pada masyarakat Mesir. Dalam kesimpulannya, Arkoun menyebutkan bahwa bagi masyarakat beragama, perubahan sosial yang dilakukannya senantiasa berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan yang dimilikinya. Simbolisme keagamaan sendiri bagi kaum beragama merupakan hal yang sangat penting, karena ia merupakan tempat keterbukaan psikologis yang asing dan mengantarkan perilaku-perilaku pribadi yang khusus.

Dari studi yang pernah saya lakukan, ditemukan beberapa hal yang tampaknya berbeda dari apa yang diramalkan Arkoun. *Pertama*, walaupun tetap menggunakan pemikiran agama Islam dengan corak pemikiran abad pertengahan, namun kiai terbukti melakukan sejumlah penafsiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Apa yang digariskan ulama abad pertengahan, tidak diterima begitu saja, tetapi ditafsir ulang sesuai dengan kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Tafsir yang dilakukan kiai memang tidak merupakan kritik pada esensi yang ditawarkan ulama abad pertengahan, juga tidak langsung pada al-Qur'an ataupun Hadits, tetapi dengan cara melakukan tafsir sosial dan tekstual melalui metode berpikir *Ushl al-Fiqh* yang dipinjam dari ulama abad pertengahan. Dengan berdasar pada kaidah *ushl al-fiqh* "*al-muhafazhatu 'ala al-qodim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah*," misalnya, para kiai menjadi sangat akomodatif pada perubahan baru yang ditawarkan alam pikiran modern atau alam pikiran yang didominasi tradisi lokal yang ada.

Kedua, secara umum seluruh kiai memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan. Hal ini pada awalnya didasarkan pada prinsip – meminjam istilah Syiah, "*takiyah*" – menyembunyikan kekuatan pada saat kondisi tidak memungkinkan untuk berkembang. Strategi *takiyah* ini dikemukakan sebagai jawaban atas kondisi politik yang tidak kondusif. Namun selanjutnya, strategi pemusatan perhatian pada pendidikan ini dijadikan sebagai satu-satunya cara yang mereka tempuh. Urusan sosial politik akhirnya cenderung dilerantarkan. Hal ini tercermin, salah satunya, pada materi yang diajarkan, yang masih terbatas hanya pada materi-materi di sekitar ibadah privat dan menafikan – tidak memberikan perhatian serius – urusan ibadah publik.

Sehingga, ketika arus reformasi pertama kali merebak ke permukaan, banyak kiai di antaranya yang tampak gagap dalam menanggapi.

Hal yang juga menarik berkaitan dengan peran sosial politik kiai adalah adanya indikasi bahwa, ada hubungan antara persepsi teologis dengan perilaku sosial politik kiai. Perbedaan persepsi teologis para kiai memperlihatkan adanya perbedaan perilaku sosial politik yang diperankannya. Hubungan-hubungan tersebut selanjutnya dapat diamati pada beberapa hal seperti : 1) Di tengah perubahan sosiokultural masyarakat Indonesia khususnya dalam usaha merespon momentum reformasi secara euforia, perilaku sosial politik yang diperankan para kiai memperlihatkan adanya perbedaan kognisi yang dimilikinya; 2) Jika teori *kasb* dipersepsi sebagai pemberian porsi lebih besar terhadap *qadariyah*, maka perilaku sosial politik kiai meninggi, demikian pula sebaliknya; 3) Persepsi teologis serta perilaku sosial politik kiai tertentu tidak secara otomatis menghasilkan peran perubah pada masyarakat sekitarnya. Kenyataan ini terutama lebih diakibatkan oleh karena adanya pertentangan antara medan politik dalam diri kiai dan medan politik yang berkembang di luar diri kiai (masyarakat).

Secara spesifik, perbedaan perilaku sosial politik kiai terlihat juga pada kelenturan sikap politik yang diperankannya. Kiai dengan latar sosiorelijius kelompok modernis seperti Persis dan Syarikat Islam (SI), misalnya, memiliki sikap yang cenderung tertutup dengan mendasarkan argumentasinya pada pemahaman tekstual atas pesan-pesan wahyu baik yang bersumber pada al-Qur'an maupun hadits. Sementara kiai dengan latar sosiorelijius kelompok tradisional seperti Nahdatul Ulama (NU), pada umumnya lebih mendasarkan argumentasinya pada pemaknaan terhadap konteks secara lebih bebas sehingga memiliki sikap yang cenderung lentur dan terbuka. Di kalangan kiai NU, misalnya, dengan mendasarkan pada kaidah *Taghayyur al-Ahkam bi al-Taghayyur al-Azminati wa al-Amkinati wa al-Ahwali*, pernah lahir sejumlah ijtihad politik sebagai produk dari sikap lenturnya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, seperti sikap penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas, pemberian gelar *Walyul amri ad-daruri bisy-Syaukah* kepada Soekarno, dan lain sebagainya. Kecenderungan-kecenderungan tersebut pada dasarnya merupakan implikasi dari perbedaan persepsi teologis yang dianutnya, meskipun dalam banyak hal memiliki akar teologis yang relatif sama.

Berkaitan dengan terjadinya perubahan-perubahan situasional menyangkut pilihan-pilihan dan kecenderungan politik yang terjadi, secara umum dapat dikemukakan ada dua model kiai. *Pertama*, model yang lebih memilih diam ketika menghadapi berbagai perubahan sosial politik. Mereka

biasanya memilih untuk lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah) yang dimilikinya, ketimbang ikut terlibat dalam urusan sosial politik yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kehancuran lembaga dakwah tersebut. Kiai tipe ini, sering teramat hati-hati dalam menanggapi perubahan sosial politik.

Kedua, model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik yang terjadi. Perubahan bagi mereka merupakan tawaran nilai dari sesuatu yang baru, yang mungkin saja mengandung hal yang lebih baik dari nilai lama. Sehingga dengan demikian ia bisa dikompromikan untuk diterima. Sikap ini membuat mereka lebih berani untuk terjun pada perubahan sosial politik yang terjadi sambil mentransformasikan nilai-nilai lama. Perubahan sosial politik dengan cara ini bisa tetap berjalan dalam jalur yang aman, tidak bersitegang dengan tradisi yang telah berkembang. Kiai tipe ini cenderung agresif, termasuk ikut terlibat membidani kelahiran partai-partai.

Kesimpulan

1. Secara normatif, kiai tetap dipandang sebagai sosok karismatik yang memainkan peran-peran sosialnya secara signifikan. Ia ditempatkan sebagai sumber “fatwa” terakhir ketika masyarakat berada diantara pilihan-pilihan politik yang membingungkan. Disisi lain fenomena perubahan-perubahan struktur kognisi kiai berkenaan dengan peran sosial politik, berkaitan erat dengan persepsi teologis yang dianutnya.
2. Ada dua temuan berkaitan dengan peran sosial politik kiai yang nampak berbeda dari apa yang diramalkan Arkoun Pertama, walaupun tetap menggunakan corak pemikiran abad pertengahan, namun kiai terbukti melakukan sejumlah penafsiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Kedua, secara umum seluruh kiai memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan dan cenderung menelantarkan urusan sosial politik.
3. Diindikasikan, ada hubungan antara persepsi teologi dengan perilaku sosial politik kiai. Perbedaan persepsi teologis para kiai memperlihatkan adanya perbedaan perilaku sosial politik yang diperankannya.
4. Secara spesifik perbedaan perilaku sosial politik kiai terlihat juga pada kelenturan sikap politik yang diperankannya. Kiai dengan latar sosioreligius kelompok modernis memiliki sikap yang cenderung tertutup dengan mendasarkan argumentasinya pada pemahaman tekstual atas pesan-pesan wahyu, baik yang bersumber Al-Qur’an maupun hadits. Sedangkan kiai dengan latar belakang sosioreligius kelompok tradisional

pada umumnya mendasarkan argumentasinya pada pemahaman terhadap konteks secara lebih bebas sehingga memiliki sikap yang cenderung lentur dan terbuka.

5. Terdapat dua model kiai yakni, pertama, model yang memilih diam, ketika menghadapi berbagai perubahan sosial politik mereka biasanya lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah). Kedua, model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik, cenderung agresif dan ikut terlibat membidani kelahiran partai-partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkoun, Mohammed. 1994. *Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*. Jakarta:INIS
- Bruinessen, Martin van. 1998. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Yogyakarta : Bentang Budaya.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. 1999. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta : LKis
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta : LP3ES.
- Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta. Paramadina.
- Faridl, Miftah. 2000. *Peran Persepsi Teologis dalam Perilaku Sosial Politik Kiai*. (Disertasi pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Feally, Greg dan Greg Barton. 1997. *Tradisionalisme Radikal: Persingungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta : LKiS
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Proyayi dalam Masyarakat Jawa* (terjemahan oleh Aswab Mahasin). Jakarta : Pustaka Jaya.
- Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta : LP3ES.